

**PENEMUAN HUKUM**  
**DALAM TAFSIRAN INKONSTITUSIONAL BERSYARAT**  
**PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**  
**(Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010)**

**NANA SUPENA**

**Abstrak**

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji penemuan hukum tafsiran inkonstitusional bersyarat dalam putusan Mahkamah Konstitusi, yang terfokuskan pada Putusan MK Nomor : 46/PUU-VIII/2010. Kajian ini dilatarbelakangi oleh luasnya kewenangan MK dalam penafsiran konstitusi, termasuk berbagai putusan yang dinilai kontroversial. Hasil kajian menunjukkan bahwa UUD 1945 secara tersirat memberikan kewenangan penafsiran konstitusi kepada MK untuk menilai pertentangan norma hukum dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang. Beberapa hal yang menarik dalam melaksanakan penafsiran konstitusi sebagai tolok ukur untuk menilai pertentangan norma hukum, meliputi: *Pertama*, terkait dengan independensi dan kebebasan hakim dalam menggunakan metode penafsiran yang tidak diatur dalam hukum positif, maka hakim bebas menggunakan metode penafsiran tersebut yang sesuai dengan keyakinan hakim. *Kedua*, munculnya inkonstitusional bersyarat dalam putusan MK dinilai sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam menafsirkan undang-undang, padahal nyatanya tafsiran hakim MK adalah hanya sebagai metode penemuan hukum/*rechtsvinding* terhadap aturan yang ada, tetapi tidak mudah untuk diterapkan pada hukum acara. *Ketiga*, adanya temuan inkonstitusional bersyarat dalam putusan MK Nomor : 46/PUU-VIII/2010 memberikan penafsiran baru terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang - Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. *Keempat*, konsekuensi yuridis *pasca* temuan inkonstitusional bersyarat memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi seorang anak yang lahir di luar kawin, namun demikian, sangat sulit dilakukan untuk mendapatkan pengakuan dari ayah biologis dan/atau untuk memperoleh bukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukti lain terkait adanya hubungan darah dengan ayah biologis.

**Kata Kunci** : Penemuan Hukum, Interpretasi Hukum, Inkonstitusional Bersyarat.

**RECHTSVINDING  
IN CONDITIONAL INCONSTITUTIONAL INTERPRETATION  
ON THE DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT  
(Analysis of Constitutional Court Decision Number: 46/PUU-VIII/2010)**

**NANA SUPENA**

***Abstract***

*This study was conducted to examine the finding of conditional unconstitutional interpretation law in the decision of the Constitutional Court, which focused on the Constitutional Court Decision Number: 46/PUU-VIII/2010. This study is motivated by the broad authority of the Constitutional Court in interpreting the constitution, including various decisions that are considered controversial. The results of the study show that the 1945 Constitution implicitly gives the Constitutional Court the authority to interpret the constitution to assess the conflicting legal norms in examining the constitutionality of the law. Some of the interesting things in implementing the interpretation of the constitution as a benchmark for assessing conflicting legal norms, include: First, related to the independence and freedom of judges in using interpretive methods that are not regulated in positive law, judges are free to use the interpretation method that is in accordance with the judge's belief. Second, the emergence of conditional unconstitutionality in the Constitutional Court's decision is considered a form of abuse of power in interpreting the law, even though in fact the interpretation of the Constitutional Court judge is only a method of legal discovery/rechtsvinding against existing rules, but it is not easy to apply to procedural law. Third, the finding of conditional unconstitutionality in the Constitutional Court's decision Number: 46/PUU-VIII/2010 provides a new interpretation of Article 43 paragraph (1) of Law Number: 1 of 1974 concerning Marriage which is conditionally unconstitutional, namely unconstitutional as long as the verse is interpreted as eliminating civil relations with men who can be proven based on science and technology and/or other evidence according to law having blood relations as the father. Fourth, the juridical consequences after finding unconstitutional conditions provide legal guarantees and certainty for a child born out of wedlock, however, it is very difficult to obtain recognition from the biological father and/or to obtain evidence based on science and technology and/or other evidence. related to blood relations with biological fathers.*

***Keywords : Rechtsvinding, Legal Interpretation, Conditional Unconstitutional.***